

Model Peningkatan Akuntabilitas Keuangan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan dan Kompetensi Aparatur Desa

Lilis Puspitawati¹, Kintan Amanda², Surtikanti³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:

H83, M41, Q56

Korespondensi:

Lilis Puspitawati

(lilis.puspitawati@email.unikom.ac.id)

Received: 05-10-2023

Revised: 30-11-2023

Accepted: 18-12-2023

Published: 21-12-2023

Keywords:

Aparatus Competence,

Optimization of Siskeudes,

Village Financial Accountability

Sitasi:

Puspitawati, L., Amanda, K., & Surtikanti, S. (2023). Model Peningkatan Akuntabilitas Keuangan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan dan Kompetensi Aparatur Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 321-332. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.26>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This research aims to test the financial system optimization model and apparatus competency to increase village financial accountability. This research is motivated by an obstacle in the use of the financial system which is not yet optimal because it is predicted that there are still many village officials who are not yet able to use it. Descriptive and verification methods were used to test the model. This research came from 351 members of the population consisting of heads of financial affairs or financial operators in the Village Government in Tasikmalaya Regency. Sampling was carried out using a non-probability sampling technique with a purposive sampling method with the criteria of a village government that had implemented a village financial system (Siskeudeus), so the sample size in this study was 56 villages. Each village is represented by one sample person to be used as a respondent. The results of this research show that the village financial system is in good condition, ready to be used, and statistically has a significant positive effect on financial accountability. Different results were found in that the competence of village officials was deemed inadequate in the attitude category, so that this condition reduced the level of village financial accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji model optimalisasi sistem keuangan dan kompetensi aparatur terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini dilatarbelakangi suatu kendala dalam penggunaan sistem keuangan belum yang optimal karena diprediksi masih banyak aparatur desa yang belum mampu menggunakannya. Digunakan Metode deskriptif dan verifikatif untuk menguji model tersebut. Penelitian ini berasal dari 351 anggota populasi yang terdiri dari kepala urusan keuangan atau operator keuangan pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Tasikmalaya. Penarikan sampel dilakukan melalui teknik *non probability sampling* dengan metode purposive sampling dengan kriteria pemerintahan desa yang telah mengaplikasikan sistem keuangan desa (Siskeudeus), sehingga ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 desa. Setiap desa diwakili oleh satu orang sampel untuk dijadikan responden. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem keuangan desa dalam kondisi baik siap digunakan, dan secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil yang berbeda ditemui pada kompetensi aparatur desa dinilai kurang memadai pada kategori sikap, sehingga kondisi tersebut menurunkan tingkat akuntabilitas keuangan desa.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil dalam suatu sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (UU no 22 tahun 1999) (Barniat, 2018). Desa berperan sangat penting dalam pembangunan nasional, untuk itu pembangunan desa merupakan

landasan dalam pembangunan nasional yang harus didukung dengan sejumlah anggaran untuk melaksanakan pembangunan desa (PMK no 22/tahun 2020).

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui kementerian desa telah mengalokasikan sejumlah dana melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan di desa (Arina et al., 2021). Alokasi dana desa dikelola oleh aparatur pemerintah desa sesuai APBDes yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022 pemerintah telah menyalurkan dana desa kurang lebih sebesar Rp. 144 triliun pada kurang lebih 75.000 desa yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Humas, 2022).

Pengelolaan APBDes bertujuan agar keuangan pemerintah tertata secara akuntabel melalui sistem pengelolaan dana desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengelolaan keuangan dana desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa (Suryaningsih, 2020). Pengelolaan keuangan dikatakan akuntabel bila memenuhi instrumen: Legitimasi bagi para pembuat kebijakan, Kepekaan Keterbukaan dan Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas (Mentang et al., 2023). Kondisi yang terjadi saat ini aktivitas tata laksana dan transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa belum optimal, pelaporan dana desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta penyusunan APBDes tidak relevan dengan kebutuhan desa sehingga terdapat penggunaan dana tidak sesuai kebutuhan dan menghambat penyaluran dana desa tahap selanjutnya (Novitasari et al., 2022; Seputro et al., 2017).

Dalam menyikapi kondisi tersebut dibutuhkan suatu aplikasi keuangan agar

pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel serta dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan dana desa agar dana dapat disalurkan sesuai kebutuhan. Untuk mengkomodir kebutuhan tersebut, pemerintah melalui kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan BPKP mengembangkan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa atau yang dikenal dengan istilah Siskeudes (Puspasari & Purnama, 2018). Berdasarkan edaran dari Kemendagri penerapan aplikasi Siskeudes harus dilakukan secara bertahap mulai tahun 2019 pada seluruh desa di Indonesia, artinya aparatur desa harus sudah mengimplementasikan aplikasi ini dalam pengelolaan keuangannya mulai tahun 2019 (Maulida, 2021).

Siskeudes merupakan sistem aplikasi yang dikembangkan pemerintah untuk membantu aparatur desa melakukan aktivitas pengelolaan keuangan desa dalam menyusun dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan desa. Penggunaan aplikasi Siskeudes bertujuan untuk mempermudah aparatur pemerintah desa dalam menyusun dan mengelola APBDes, sehingga lebih transparan, akuntabel serta tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana desa (Suryaningsih, 2020).

Hasil survey BPKP pada akhir tahun 2019 menunjukkan masih banyak desa minim sarana prasarana termasuk minimnya penggunaan aplikasi siskeudes karena terkendala supply listrik dan jaringan internet yang terbatas di daerah terpencil, padahal BPKP dan KPK telah menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi siskeudes pada semua desa di wilayah Indonesia, kondisi ini menunjukkan masih banyak desa terpencil di Indonesia belum mampu mengimplementasikan aplikasi siskeudes secara optimal karena terhambat jaringan listrik dan internet. Dampak dari kondisi tersebut aktivitas pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban dinyatakan belum optimal (Loupatty, 2022).

Penggunaan aplikasi keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan handal, oleh karenanya akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi pula oleh kompetensi aparatur desa. Kecukupan wawasan pengetahuan tentang teknologi informasi, kemandirian, motivasi dan kecakapan dalam menggunakan teknologi merupakan modal penting yang harus dimiliki aparatur desa agar penggunaan aplikasi dapat berjalan dengan optimal. Dengan adanya modal intelektual tersebut, hasilnya diharapkan ke depan diimplementasikan oleh para aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola serta mempertanggungjawabkan (Ridwan, 2019).

Kompetensi merupakan suatu ciri yang melekat dari individu yang mencerminkan kemampuan individu dalam melakukan sesuatu dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan (Rizki & Sulistyan, 2022). Berbagai teori pakar dan hasil studi menunjukkan kompetensi sangat berkaitan erat dengan efektifitas penggunaan teknologi atau aplikasi. Kompetensi yang memadai mengandung komponen pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi dan konsep diri. Kompetensi yang dimiliki menunjukkan tingkat profesionalisme seseorang dalam menangani bidang pekerjaannya, semakin spesifik kompetensi yang dimiliki maka akan semakin profesional dalam bekerja dan dalam menentukan keputusan strategis (Rizki & Sulistyan, 2022; Sumardjo & Priansa, 2018). Hal ini dapat juga diilustrasikan dalam penggunaan sebuah aplikasi siskeudes, semakin kompeten aparatur desa menggunakan aplikasi Siskeudes maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Konsep tersebut dapat dibuktikan melalui maraknya kasus penyaluran dana yang tidak optimal akibat dari rendahnya akuntabilitas dari pengelolaan dana desa. Kemampuan pengelolaan aparatur desa yang rendah disinyalir menjadi penyebab terjadinya kasus penyaluran dana tersebut karena minimnya kompetensi aparat pemerintah Desa. Permasalahan tersebut mengindikasikan

minimnya kompetensi aparat pemerintah desa dalam melakukan menyalurkan dana desa dari pemerintah pusat, yang berdampak pada pembangunan desa menjadi daerah tertinggal (Sopannah et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji model optimalisasi sistem keuangan dan kompetensi aparatur desa terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan desa Kabupaten Tasikmalaya Indonesia. Variabel yang akan diuji dipandang cukup komprehensif dalam menguji peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang mengkombinasikan unsur aplikasi sistem pengelolaan keuangan dan kompetensi aparatur yang mana kedua variabel tersebut dianggap mencukupi dan lengkap dalam menguji model akuntabilitas tersebut bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianti et al. (2019) yang hanya menguji pengaruh variabel Sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa, maupun penelitian yang dilakukan oleh Jannah et al. (2018) yang menguji variabel kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Praya Timur.

2. TELAAH TEORI

2.1. Sistem Pengelolaan Dana Desa (Siskeudeus)

Siskeudes merupakan kepanjangan dari sistem keuangan desa yang pada dasarnya merupakan sistem informasi akuntansi yang dikembangkan pada pemerintahan desa. Sistem pengelola dana desa merupakan implementasi sistem informasi akuntansi pada yang diterapkan untuk mengelola keuangan desa. Menurut Romney and Steinbart (2018) berpendapat sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi

informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan. Selanjutnya Menurut Jaya (2018), sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.

Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, serta pengolahan data transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat berguna bagi para penggunaannya dalam membuat keputusan strategis.

Jaya (2018) menentukan 6 (enam) komponen utama sistem informasi akuntansi yaitu: 1. Pengguna sistem; 2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data; 3. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatannya; 4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data; 5. Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, perangkat perifer, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi; serta 6. Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi.

2.2. Kompetensi Aparatur Desa.

Kompetensi merupakan gambaran kemampuan individu dalam melaksanakan pekerjaannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang secara langsung mempengaruhi kinerjanya (Mangkunegara, 2017). Selanjutnya menurut Busro (2018), kompetensi merupakan perpaduan pengetahuan dan keahlian yang terlihat nyata dan berbeda dari suatu individu. Dengan demikian kompetensi merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang

didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap.

Lasmaya (2016) menyatakan terdapat 6 (enam) unsur yang membentuk diantaranya kompetensi yaitu: Motif (*motive*), Sifat (*traits*), Konsep diri (*self-concept*), Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan (*skill*). Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang melekat pada individu yang mencerminkan kemampuan individu dalam melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pada umumnya akuntabilitas dikenal sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat memerintah kepada yang pihak yang memberi mandat (Sopannah et al., 2023). Bila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan akuntabilitas merupakan konsep yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban dan proses penganggaran serta merupakan tugas yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan anggaran dalam menjelaskan bagaimana dana publik tersebut digunakan (Sopannah et al., 2020). Lebih lanjut Novitasari et al. (2022) menyampaikan akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini agen dalam menyajikan, melaporkan, mengungkapkan serta mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pemberi pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan berbagai pendapat maka dapat disimpulkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan dan meminta keterangan mengenai kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan tertentu.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 222/PMK.07/2020 yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran,

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Penerimaan dan pengeluaran APBN yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan kepada masyarakat melalui kabupaten/kota untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pembuktian telah dilaksanakannya kewajiban aparat desa terkait tugasnya dalam hal mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa agar dilaksanakan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat diukur melalui sudut pandang faktor penting dari Legitimasi bagi para pembuat kebijakan, kepekaan, keterbukaan, upaya peningkatan efisiensi serta efektivitas (Sopanah et al., 2020).

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Optimalisasi penggunaan sistem pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan desa

H₂: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif bertujuan agar penelitian ini dapat memberikan gambaran hasil yang lengkap mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu optimalisasi penggunaan sistem keuangan desa atau siskeudes, kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas keuangan. Analisis kuantitatif digunakan untuk menguji keterkaitan variabel yang diuji melalui hipotesis dan diuji secara

statisik, selanjutnya model penelitian diuji menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian ini berdasarkan data populasi pada unit analisis 351 Desa di Kabupaten Tasikmalaya. Mengacu pada asumsi Hair et al. (2014), ukuran sampel minimal yang memenuhi syarat analisis multivariat berkisar antara 30 sampai dengan 60 responden. Penarikan sampel dilakukan melalui teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling berdasarkan pada kriteria pemerintahan desa yang telah menggunakan Siskeudes, sehingga ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 desa dengan responden penelitian kepala urusan (kaur) keuangan atau operator aplikasi siskeudes. Keabsahan dan relevansi kuesioner diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

Penetapan peringkat dalam setiap variabel penelitian dilakukan dengan cara membandingkan antara skor aktual dengan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden sesuai klasifikasi bobot yang diberikan (1,2,3,4,5). Sedangkan skor ideal diperoleh melalui perolehan prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah kuesioner dikalikan jumlah responden dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{skor} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.
- Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Selanjutnya hasil perhitungan perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal dikontribusikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kriteria persentase skor tanggapan responden

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20 - 36%	Sangat Rendah / Tidak Baik
2	36,01 - 52,00%	Rendah / Kurang Baik
3	52,01 - 68,00%	Cukup Tinggi / Cukup Baik
4	68,01 - 84,00%	Baik
5	84,01 - 100%	Sangat Baik

Sumber: Data Pengembangan Peneliti (2023)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Deskripsi Hasil penggunaan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes)

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SISKEUDES), peneliti menggunakan nilai persentase skor. Pada variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SISKEUDES) terdiri dari 6 item indikator yaitu Para pengguna yang menggunakan sistem, Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, Data yang

berisikan tentang organisasi serta kegiatannya, Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data, Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, perangkat perifer, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi, dan Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi. Persentase dan rekapitulasi skor jawaban responden terhadap Indikator-indikator penerapan SIA (SISKEUDES) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekapitulasi jawaban responden Sistem Informasi Keuangan desa (X_1)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Pengguna Sistem	216	280	77,14%	Baik
2	Prosedur dan intruksi dalam pengolahan data	215	280	76,79%	Baik
3	Data	198	280	70,71%	Baik
4	Perangkat lunak yang digunakan	218	280	77,86%	Baik
5	Infrastruktur teknologi informasi,	252	280	90,00%	Sangat Baik
6	Pengendalian internal dan prosedur keamanan	215	280	76,79%	Baik
Total		1314	1680	78,21%	Baik

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 4.1. tersebut memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel penerapan sistem informasi akuntansi (SISKEUDES) sebesar 78,21% berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pengendalian Internal berada dalam kategori baik.

Deskripsi Hasil Kompetensi Sumber Daya Manusia

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap

indikator mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, peneliti menggunakan nilai persentase skor pada variabel Kompetensi

Sumber Daya Manusia terdiri dari 5 (lima) item indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Motif (*Motive*), Sifat (*Traits*), Konsep Diri (*Self Concept*), Pengetahuan (*Knowledge*) dan Keterampilan (*Skill*). Persentase dan rekapitulasi dari 5 (lima) indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Rekapitulasi jawaban responden Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Motif (<i>Motive</i>)	216	280	77,14%	Baik
2	Sifat (<i>Traits</i>)	186	280	66,43%	Cukup
3	Konsep Diri (<i>Self Concept</i>)	233	280	83,21%	Baik
4	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	249	280	88,93%	Sangat Baik
5	Keterampilan (<i>Skill</i>)	249	280	88,93%	Sangat Baik
Total		1133	1400	80,92%	Baik

Sumber: Data Diolah (2023)

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kompetensi SDM sebesar 78,21% berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pengendalian Internal berada dalam kategori baik.

Deskripsi Hasil Akuntabilitas Keuangan Desa.

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap

indikator mengenai Akuntabilitas, peneliti menggunakan nilai persentase skor. Pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terdiri dari 4 (empat) item indikator. Indikator-indikator tersebut adalah legitimasi bagi para pembuat kebijakan, kepekaan (*Sensitivity*), keterbukaan (*Transparency*), dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas. Berikut persentase dan rekapitulasi dari indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 4.3. Rekapitulasi jawaban responden mengenai Akuntabilitas Keuangan Desa

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Legitimasi bagi para pembuat kebijakan	268	280	95,71%	Sangat Baik
2	Kepekaan	228	280	81,43%	Baik
3	Keterbukaan	231	280	82,50%	Baik
4	Upaya peningkatan efisien dan efektivitas	239	280	85,36%	Sangat Baik
Total		966	1120	86,25%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 86,25% berada di antara interval 84% - 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas keuangan Desa berada dalam kategori sangat baik.

Hasil Pengujian Statistik.

Sebelum dilakukan pengujian regresi linear berganda dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasi. Uji Asumsi Klasik menunjukkan hasil data residual telah berdistribusi normal karena hasil nilai

signifikansi 0,200, lebih besar dari 0,05. Selanjutnya hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai *tolerance* 0,735 lebih besar dari > 0,10 artinya tidak terjadi multikolinieritas. Nilai VIF sebesar 1,360 lebih kecil dari 10,00, maka artinya tidak terjadi multikolinieritas. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi X_1 sebesar 0,724 dan X_2 sebesar 0,578, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dikarenakan nilai signifikasinya lebih dari > 0,05.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda, Analisis Korelasi dan Koefisien determinasi.

Model kelayakan regresi linier didasarkan pada 2 (dua) hal utama yaitu: 1). Prediktor

yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak dengan kriteria kelayakan angka standar *Error Of Estimate < Standar Deviation*, dan 2). Data harus berdistribusi norma. Hasil

pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS v 23, disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4. Hasil Analisis Regresi

	B	t	Sig	Keterangan
Konstan	12,479	5,585	0,000	
Siskeudes -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana	0,222	2,535	0,013	Diterima
Kompetensi Aparatur Desa -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana	0,288	2,725	0,009	Diterima
R = 0,633				

Sumber: Data Diolah (2023)

Mengacu pada tabel 4.4, maka dibuatlah hasil untuk model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Atau

$$Y = 12,479 + 0,222 X_1 + 0,288 X_2$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

a = Konstanta

B_1X_1 = Koefisien Regresi Variabel X_1

B_2X_2 = Koefisien Regresi Variabel X_2

Terdapat hasil dari perhitungan menggunakan SPSS V 23, nilai dari Sistem Informasi keuangan Desa atau Siskeudes (X_1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y) adalah 0,222. Kemudian nilai konstanta Kompetensi aparat (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y) sebesar 0,288. Hasil Persamaan regresi tersebut selanjutnya dapat diartikan sebagai berikut:

1. Setiap terdapat peningkatan sebesar 1 (satu) satuan pada variabel Sistem Informasi keuangan Desa atau Siskeudes (X_1), akan meningkatkan nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y) sebesar 0,222.
2. Setiap terdapat peningkatan sebesar 1 (satu) satuan pada variabel Kompetensi aparatur Desa (X_2), akan meningkatkan nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y) sebesar 0,288.
3. Akuntabilitas Pengelolaan dana (Y) akan bernilai 12,479 bila Sistem Informasi keuangan Desa atau Siskeudes (X_1) dan

variabel kompetensi aparatur desa (X_2) memiliki nilai 0 atau dianggap konstan.

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui nilai koefisien R Square (R^2) sebesar 0,633 atau 63,3% artinya variabel sistem informasi keuangan desa atau siskeudeus (X_1) dan Kompetensi aparatur desa (X_2) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa sebesar 63,3% dan sisanya sebesar 36,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan melalui tabel 4.4 diketahui bahwa:

1. Nilai Signifikansi untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebesar $0,013 < 0,05$ dan t hitung $2,535 > t$ tabel $2,006$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang artinya sistem informasi keuangan desa atau siskeudeus (X_1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y)
2. Nilai Signifikansi untuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,009 < 0,05$ dan t hitung $2,725 > t$ tabel $2,006$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang berarti Kompetensi aparatur desa (X_2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y).

4.2. Pembahasan Penelitian

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,535 lebih besar dari t_{tabel} 2,006 yang artinya semakin optimalnya

penggunaan sistem informasi keuangan desa (siskeudes) akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. pemerintahan desa di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Penelitian juga menunjukkan sistem informasi keuangan desa (siskeudes) berpengaruh cukup dominan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (50,9%), sedangkan sisanya sebesar 49,1% dipengaruhi faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Hasil pengujian korelasi menunjukkan optimalisasi sistem informasi keuangan desa (siskeudes) memiliki hubungan positif dan keeratan hubungan yang sedang dalam peningkatan akuntabilitas keuangan desa, kondisi tersebut menunjukkan hasil penelitian ini masih relevan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2013:2) bahwa akuntabilitas keuangan akan meningkat bila pemerintah daerah difasilitasi dengan sistem informasi keuangan daerah yang memadai sehingga penyerapan dana akan lebih transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Hasil penelitian ini relevan pula dengan pernyataan Harjito (2014:87) bahwa kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi dipengaruhi oleh pengguna sistem dan pengaruh organisasional, aparat desa selaku organisasi pengguna pengguna sistem harus mengoptimalkan penggunaan aplikasi keuanagn yang tersedia agar dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Hasil Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widia Yulianti, Kamaliah dan Rasuli (2018) dan Fachrur Rozie (2022).

Penelitian ini menunjukkan adanya temuan bahwa sistem informasi keuangan desa dapat dioptimalkan dengan cara melakukan perapihan pada sistem pengarsipan data transaksi keuangan, kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa terdapat nilai yang kurang optimal pada indikator organisasi hanya sebesar 70,71% dan memiliki nilai paling rendah bila dibandingkan dengan indikator yang lainnya. Kondisi tersebut

menunjukkan sistem arsip data transaksi keuangan belum terorganisir dengan baik sehingga dibutuhkan penataan ulang sistem arsip data keuangan pada berbagai desa di wilayah kabupaten tasikmalaya. Agar hasilnya lebih optimal, aparat desa juga perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penatausahaan/pengarsipan data dengan baik.

Temuan dilapangan juga menunjukkan aplikasi siskeudes belum dapat menjangkau semua desa di wilayah kabupaten tasikmalaya karena terkendala oleh terbatasnya jaringan listrik PLN dan jaringan internet khususnya di desa terpencil. Kondisi ini memicu terjadinya permasalahan baru yaitu minimnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa serta adanya permasalahan laporan pertanggungjawaban keuangann yang dibuat aparat desa belum mengikuti standar sehingga rawan terjadinya manipulasi serta belum menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa yang berimbas pada terhambatnya penyaluran dana desa ke-tahap selanjutnya

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengujian hipotesis menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sehingga dapat diartikan semakin meningkat kompetensi aparat desa akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis pertama signifikan. Penelitian ini menunjukkan kompetensi aparat desa memiliki pengaruh yang lemah (12,4%) terhadap (akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sisanya 87,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil analisis korelasi menunjukkan komptensi aparat desa memiliki hubungan positif dengan tingkat keeratan hubungan yang lemah terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan desa, artinya

meningkatnya akuntabilitas keuangan desa secara dominan lebih disebabkan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Kondisi ini menjadi temuan karena beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi memiliki korelasi yang cukup erat terhadap peningkatan akuntabilitas, dan seluruh potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya penelitian Indra Kesuma (2014) menunjukkan hasil kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan perusahaan yang menimbulkan menurunnya tingkat akuntabilitas keuangan desa.

Kemudian berdasarkan temuan penelitian Saputra, K. A. K., Subroto, B., Rahman, A. F., & Saraswati, E. (2021), menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana di pemerintahan desa di kabupaten Tabanan; demikian pula dengan temuan penelitian Riadul Jannah (2018) menunjukkan kompetensi SDM, penggunaan teknologi informasi dan partisipasi publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Praya Timur. Walaupun terdapat perbedaan hasil, namun pada dasarnya hasil penelitian ini masih relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya karena secara statistik membuktikan kedua variabel yang diteliti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Selanjutnya terdapat temuan pada indikator Sikap (traits) dari variabel kompetensi aparatur desa. Dalam indikator sikap ditanyakan apakah responden merasa senang dengan diimplementasikannya siskeudeus. Sebagian besar responden atau sebanyak 66,43% responden menjawab cukup senang dengan diimplementasikannya aplikasi siskeudeus. Kondisi ini

mencerminkan aparatur desa belum sepenuhnya dapat mengadopsi aplikasi siskeudeus yang digunakan dalam aktivitas pengelolaan keuangan desa, padahal aplikasi siskeudeus terbukti sangat membantu aparatur desa dalam melaporkan transaksi keuangan di desa.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar apa yang menjadi penyebab para aparatur desa tidak merespon dengan baik adanya aplikasi siskeudes tersebut, dan melalui wawancara dengan aparatur desa terdapat informasi bahwa aparatur desa belum mampu menggunakan aplikasi siskeudes dengan baik karena minimnya pelatihan dan sosialisasi dalam hal penggunaan aplikasi tersebut, sehingga keberadaan aplikasi tersebut dianggap menambah pekerjaan pengelolaan keuangan lebih kompleks dan rumit, yang berdampak pada ketidaknyamanan dalam mengadopsi perubahan yang ada karena diimplementasikannya sistem aplikasi yang baru dalam pengelolaan keuangan.

5. KESIMPULAN

Optimalisasi aplikasi sistem informasi keuangan dan kompetensi aparatur desa secara statistik berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah pada pemerintahan desa, dengan kriteria pengaruh yang cukup. Kondisi tersebut menunjukkan semakin optimal penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan desa maka akuntabilitas keuangan desa juga akan meningkat, demikian pula dengan adanya peningkatan kompetensi aparatur maka akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan desa.

Penelitian ini mendapatkan fakta penting bahwa aparatur desa kurang begitu berminat dalam menggunakan aplikasi siskeudes yang disediakan pemerintah untuk membantu mereka dalam mengelola keuangan, hal ini disebabkan karena penggunaan aplikasi siskeudes belum disosialisasikan secara merata dan minimnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan aparatur dalam menggunakan aplikasi sehingga pengguna

enggan menggunakan aplikasi siskeudes karena belum terbiasa dan belum mahir.

Selain itu adanya keterbatasan jaringan listrik yang tidak stabil serta keterbatasan jaringan internet menjadi penyebab utama penggunaan aplikasi siskeudes belum optimal digunakan pada seluruh desa di kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemangku kebijakan dalam menentukan upaya dan strategi terbaik untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pada pemerintahan desa yang dipandang masih membutuhkan pembenahan yang intensif, agar dana desa dapat disalurkan tepat sasaran sehingga dapat mengangkat roda perekonomian dan pembangunan desa.

REFERENCES

- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangundi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22-41. <https://doi.org/10.35794/jpekd.35490.2.3.2021>
- Barniat, Z. (2018). Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 25-40. <https://doi.org/10.23960/jasp.v2i2.28>
- Busro, M. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenada Media Group.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). *European Business Review*, 26(2), 106-121. <https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128>
- Humas. (2022). *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*. Retrieved 2022 from <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>
- Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. (2018). The Influence of Human Resources, Use of Information Technology and Public Participation to the Transparency and Accountability of Village Financial Management. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(5), 373-385. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v6i5.em03>
- Jaya, H. (2018). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus PT Putra Indo Cahaya Batam). *Measurement*, 12(2), 152-167. <https://doi.org/10.33373/mja.v12i2.1741>
- Lasmaya, S. M. (2016). Pengaruh sistem informasi SDM, kompetensi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, & Entrepreneurship*, 10(1), 25-43.
- Loupaty, L. G. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Siskeudes Sebagai Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Komparatif Di Kota Ambon Dankecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 697-709. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i102.1137>
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Maulida, E. (2021). *Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya)* Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Mentang, A., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Dalam Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2021 Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1-7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/49731>

- Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1598-1609.
- Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145-159.
<https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1719>
- Ridwan, M. A. (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran UIN Raden Intan Lampung)*.
- Rizki, V. L., & Sulistyan, R. B. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Widya Gama Press.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Chapter 10: Processing integrity and availability controls. Accounting information systems (14th ed.)*. Pearson Education Limited.
- Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). Potensi Fraud Dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 79-93.
<https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.284>
- Sopanah, A., Fatoni, I., Danawanti, M. O., Harmadji, D. E., Mulia, E., Puspitosarie, E., Sari, Y. P., Zamzami, F., Faiz, I. A., Huda, I., Setiawan, A. R., Ulfah, A. K., & Arifin, J. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Scopindo Media Pustaka.
- Sopanah, A., Hasan, K., Putra, S. K., & Rusdianti, I. S. (2023). *Akuntabilitas publik organisasi nirlaba*. Scopindo Media Pustaka.
- Sumardjo, M., & Priansa, D. J. (2018). *Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia Konsep-konsep Kunci*. Alfabeta.
- Suryaningsih, N. K. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Partisipasi Pengguna, dan Usability System Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Universitas Pendidikan Ganesha*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yulianti, W., Kamaliah, & Rasuli. (2019). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi*, 27(4), 386-398.
<https://doi.org/10.31258/je.27.4.p.386-398>